



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI PROVINSI PAPUA BARAT 2021

ISSN	: 2654-8909
No. Publikasi	: 91000.2201
Katalog	: 7102025.91
Ukuran Buku	: 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman	: x + 71 Halaman
Naskah :	Https://papuabarat.bps.go.id
BPS Provinsi Papua Barat	668.53
Penyunting :	A A CALLERY OF THE SECOND SECO
BPS Provinsi Papua Barat	a Uzilo e
Desain Kover :	·111/2314
BPS Provinsi Papua Barat	With S.
Diterbitkan Oleh :	
©BPS Provinsi Papua Barat	
Dicetak Oleh :	
CV. Nario Sari	
Sumber Ilustrasi:	
www.unsplash.com	
	endistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan
	ku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat
Statistik	

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

PROVINSI PAPUA BARAT

2021

Anggota Tim Penyusun:

Penanggung Jawab : Maritje Pattiwaellapia, SE, M.Si

Penyunting : Lasmini, SST, M.Stat & OpRes

Editor : Listra Tandi Roma, SST

Penulis : Debita Tejo Saputri, SST

Pengolah Data : Debita Tejo Saputri, SST

Penyimpan Draft : Debita Tejo Saputri, SST

Desain Infografis : Widya Andi Karmila Saputri, S.Si

https://papuabarat.bps.do.id

KATA PENGANTAR

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah suatu indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang konstruksi antarwilayah pada periode waktu tertentu. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tahun 2021 merupakan salah satu komponen utama yang digunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022. Maka, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat memandang perlu untuk menerbitkan Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Papua Barat 2021 guna memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan serta pengguna data.

Publikasi ini merupakan terbitan ketiga untuk tingkat provinsi Papua Barat. Dengan adanya publikasi ini diharapkan informasi di dalamnya dapat berguna, terutama bagi para pengambil keputusan, penyusun rencana dan evaluasi dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Barat.

BPS Provinsi Papua Barat tidak lupa memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, serta menyampaikan terima kasih atas bantuan dari berbagai pihak selama proses pengerjaan hingga publikasi ini dapat terbit. Kritik dan saran sangat diharapkan dari pengguna publikasi ini guna perbaikan pada terbitan selanjutnya.

Manokwari, Februari 2022

KEPALA BPS PROVINSI PAPUA BARAT

Maritje Pattiwaellapia, S.E, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PI	ENG	ANTAR	V
DAFTAR	R ISI.		vi
DAFTAR	RTAE	BEL	. viii
DAFTAR	R GA	MBAR	ix
BAB I PI	END	AHULUAN	1
1.1.	Lat	ar Belakang	3
1.2.	Tuj	uan	4
1.3.	Rua	ang Lingkup	5
		EP DAN DEFINISI	
BAB III I	MET	ODOLOGI	11
3.1.		nilihan Responden	
3.2.	Me	tode Pengumpulan Data	13
3.3.	Me	tode Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	14
3.4.	Per	nghitungan Diagram Timbang Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) .	16
3.4	.1.	Basket of Construction Components Approach (BOCC)	16
3.4	.2.	Sistem Konstruksi	19
3.4	.3.	Komponen Konstruksi	22
3.4	.4.	Prosedur Penghitungan Penimbang	23
3.4	.5.	Dana Alokasi Umum	26
BAB IV	PEM	BAHASAN RINGKAS	29
4.1.	Gar	mbaran Umum Provinsi Papua Barat	31
4.2.	Ind	eks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi Papua Barat	34
4.3.	Ind	eks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi Papua Barat Berdasarkar	1
	Kab	oupaten/Kota	37

DAFTAR ISI

	4.3.1.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Fakfak 3	7
	4.3.2.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Kaimana	8
	4.3.3.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Teluk Wondama 3	9
	4.3.4.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Teluk Bintuni 4	ŀO
	4.3.5.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Manokwari4	1
	4.3.6.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Sorong Selatan 4	2
	4.3.7.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Sorong4	13
	4.3.8.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Raja Ampat4	4
	4.3.9.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Tambrauw4	-5
	4.3.10.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Maybrat4	6
	4.3.11.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Manokwari Selatan 4	7
	4.3.12.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Pegunungan Arfak 4	8
	4.3.13.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Sorong4	9
DAF	TAR PUS	TAKA5	1
LAN	/IPIRAN	5	3

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penjelasan Sistem Konstruksi untuk Bangunan Rumah dan Gedung 19
Tabel 2. Penjelasan Sistem Konstruksi untuk Jenis Bangunan Jalan, Irigasi,
Jaringan dan lainnya21
Tabel 3. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Berdasarkan Provinsi di Indonesia,
202134
Tabel 4. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi Papua Barat, 2017-2021 36
Tabel 5. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Fakfak, 2017-2021 37
Tabel 6. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Kaimana, 2017-2021 38
Tabel 7. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Teluk Wondama,
2017-202139
Tabel 8. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Teluk Bintuni,
2017-202140
Tabel 9. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Manokwari,
2017-202141
Tabel 10. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Sorong Selatan,
2017-202142
Tabel 11. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Sorong, 2017-2021 43
Tabel 12. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Raja Ampat,
2017-202144
Tabel 13. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Tambrauw,
2017-202145
Tabel 14. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Maybrat, 2017-2021 46
Tabel 15. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Manokwari Selatan,
2017-202147
Tabel 16. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Pegunungan Arfak,
2017-202148
Tabel 17. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Sorong, 2017-2021 49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kategori Sektor Konstruksi	17
Gambar 2. Hubungan antara Proyek, Sistem dan Komponen	22
Gambar 3. Contoh Pemberian Kode pada Dokumen BoQ	24
Gambar 4. Proses Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	26
Gambar 5. Persentase Luas Wilayah Provinsi Papua Barat Menurut	
Kabupaten/Kota, 2021	32
Gambar 6. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota	
di Provinsi Papua Barat, 2021	37
di Provinsi Papua Barat, 2021	

https://papuabarat.bps.do.id



PENDAHULUAN

https://papuabarat.bps.do.id

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan utama suatu pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung upaya pembangunan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Otonomi Daerah sejak tanggal 1 Januari 2001, yang dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang diberlakukan di tiap daerah.

Pada dasarnya, konsep dari otonomi daerah adalah memberikan hak dan wewenang serta kewajiban kepada daerah otonom, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada daerah tersebut. Diharapkan, dengan diberlakukannya otonomi daerah, akan tercipta percepatan dan pemerataan pembangunan di semua daerah berdasarkan potensi dan sumber daya yang mereka punyai.

Dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu sumber keuangan daerah yang bersumber dari APBN guna terciptanya pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21. Dengan adanya DAU diharapkan perbedaan kemampuan keuangan antar daerah dapat diperkecil.

Penghitungan Dana Alokasi Umum berdasarkan Alokasi Dasar dan Celah Fiskal, sebagai berikut:



DAU = AD + CF

Keterangan:

DAU = Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) per Daerah

AD = Alokasi DAU dari Alokasi Dasar

CF = Alokasi DAU dari Celah Fiskal

Dimana Alokasi Dasar dihitung berdasarkan data jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan besaran belanja gaji PNSD dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan lain terkait dengan penggajian. Sedangkan Celah Fiskal merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal. Kebutuhan Fiskal merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Selain Jumlah Penduduk, Luas Wilayah (meliputi luas wilayah daratan dan perairan), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan salah satu variabel penting dalam penghitungan Kebutuhan Fiskal yang pada akhirnya menjadi komponen penting dalam perumusan DAU.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi Papua Barat 2021 antara lain:

- Menyajikan data dasar bagi kebijakan dana perimbangan, khususnya DAU untuk Tahun Anggaran 2022.
- 2. Sebagai indikator keterbandingan tingkat kemahalan antar daerah.
- 3. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan perencanaan dan perumusan kebijaksanaan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Barat secara berkesinambungan.

1.3. Ruang Lingkup

Kegiatan Penyusunan IKK Provinsi Papua Barat 2021 ini mencakup seluruh kota/kabupaten se-Papua Barat, yaitu Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kota Sorong.



https://papuabarat.bps.do.id



BAB II KONSEP DAN DEFINISI

https://papuabarat.bps.do.id

BAB II

KONSEP DAN DEFINISI

Beberapa konsep dan definisi umum yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan penghitungan IKK antara lain adalah sebagai berikut:

- Bahan bangunan/konstruksi adalah material yang digunakan dalam pembentukan komponen bangunan dan ditempatkan pada bagian suatu bangunanan/konstruksi yang merupakan satu kesatuan dari bangunan tersebut.
- **Produsen** adalah pembuat/penghasil material baik dilakukan secara manual maupun dengan bantuan peralatan/mesin.
- Pedagang grosir adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual bahan bangunan kepada pedagang lain atau kontraktor bangunan secara grosir.
- Pedagang campuran adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual bahan bangunan kepada pedagang lain, kontraktor bangunan, dan rumah tangga baik secara grosir maupun eceran.
- Pedagang eceran adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual bahan bangunan kepada rumah tangga secara eceran.
- Kegiatan Konstruksi adalah suatu kegiatan meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi yang dimaksud dalam survei ini adalah hanya kegiatan investasi (pembangunan baru, bukan renovasi yang tidak menambah

nilai aset). Hasil kegiatan antara lain: gedung, jalan jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi, dan bangunan jaringan komunikasi.

- Harga sewa alat berat konstruksi adalah harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/ institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini adalah 1 bulan atau 200 jam. Harga sewa hanya biaya sewa alat, tidak termasuk biaya mobilisasi alat dari penyewa ke lokasi proyek, dan juga tidak termasuk biaya jasa operator. Umur alat berat yang disewakan juga memiliki batas maksimal yaitu 8 tahun.
- Paket Komoditas adalah sejumlah barang terpilih yang digunakan sebagai komponen penghitungan IKK. Komoditas/jenis barang tersebut dipilih karena andil yang cukup besar dan data harganya lebih mudah dipantau dan mempunyai tingkat keterbandingan antar kabupaten/kota.
- Diagram timbang (DT) atau bobot yang digunakan dalam penghitungan IKK terdiri dari DT kelompok jenis bangunan (3 kelompok) dan DT Umum. DT kelompok jenis bangunan digunakan untuk memperoleh nilai TKK masing-masing kelompok jenisbangunan. DT umum digunakan untuk menghitung IKK umum setelah diperoleh IKK masing-masing kelompok jenis bangunan.
- Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah suatu indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang konstruksi antarwilayah. Sesuai dengan pengertiannya IKK dapat dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu indeks yang menggambarkan perbandingan harga untuk lokasi yang berbeda pada periode waktu tertentu.



https://papuabarat.bps.do.id

BAB III METODOLOGI

3.1. Pemilihan Responden

Responden Survei IKK terdiri dari pedagang grosir yang menjual bahan bangunan dan jasa penyewaan alat berat. Data yang dikumpulkan dari pedagang grosir adalah: harga bahan bangunan, sedangkan yang diperoleh dari jasa penyewaan alat berat adalah data harga sewa alat berat dan upah jasa konstruksi. Pemilihan responden dilakukan secara purposif di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Khusus untuk mengumpulkan data harga bahan bangunan yang diutamakan adalah pedagang grosir yang ada di wilayah bersangkutan. Jika tidak ada pedagang grosir, maka dipilih responden dengan skala prioritas yaitu: produsen, pedagang campuran (pedagang grosir sekaligus melayani eceran), baru kemudian pedagang eceran. Jumlah responden yang diambil untuk setiap kualitas barang terpilih adalah 3 (tiga) responden.

Lokasi responden Survei IKK harus berada di ibukota kabupaten/kota dan sekitarnya. Diusahakan responden sama untuk setiap periode pencacahan. Jika terjadi pergantian responden maka dicari penggantinya yang sesuai.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung terhadap responden menggunkan 3 (tiga) jenis kuesioner, sebagai berikut: kuesioner VHKK 2021.MNPL untuk material natural dan produk lanjutannya; kuesioner VHKK 2021.MP untuk material pabrikan; dan kuesioner VHKK 2021.SAU untuk sewa alat berat dan upah jasa kontruksi. Jika tidak memungkinkan dilakukan wawancara secara langsung, maka kuesioner bisa ditinggal untuk diisi sendiri

oleh responden. Pencacahan dilakukan pada tanggal 20 s.d 30 pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Pengawasan dan pemeriksaan dilakukan pada saat pencacahan agar data yang dikumpulkan sesuai lapangan.

Penghitungan IKK tahun 2021 menggunakan data yang dikumpulkan pada periode bulan Juli 2020, Oktober 2020, Januari 2021, dan April 2021. Hal tersebut dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi.

3.3. Metode Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Penghitungan IKK 2021 melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penghitungan nilai komponen konstruksi masing-masing sistem dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten/kota. Nilai komponen tersebut dihitung menggunakan nilai tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$NK_j = \sum_{k=1}^n p_k . q_k$$

Dengan:

 NK_j = Nilai Komponen ke-j

 p_k = Harga material/upah/sewa alat ke-k

 q_k = Kuantitas/volume material/upah/sewa alat ke-k

n = Jumlah material/upah/sewa dalam komponen ke-j

Tahap penghitungan kedua adalah menghitung PPP sistem dengan menggunakan metode regresi *Country Product Dummy (CPD)*. Model regresi *CPD* adalah sebagai berikut:

$$\ln NK_j = \alpha_i. C_i + \beta_j. P_j + \varepsilon$$



$$NK_j$$
 = Nilai Komponen ke-j

 $C_i = dummy$ kabupaten/kota ke-i

 P_j = dummy komponen ke-j dalam suatu sistem dan bangunan

$$\alpha_i$$
 dan β_j = Koefisien regresi

PPP (Purchasing Power Parity)_{Sistem_i} =
$$\exp^{(\alpha_i)}$$

$$\alpha_i$$
 dan β_j = Koefisien regresi

PPP (Purchasing Power Parity)_{Sistem_i} =
$$\exp^{(\alpha_i)}$$

Tahap Penghitungan ketiga adalah menghitung PPP bangunan dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot sistem) dengan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{bangunan_i} = \left(\prod_{i=1}^{n} PPP_{Sistem_i}\right)^{w2_i}$$

Dengan:

n = Jumlah sistem dalam suatu bangunan

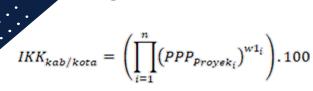
Tahap Penghitungan keempat adalah menghitung PPP proyek dengan menggunakan ratarata geometrik dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{proyek_i} = \left(\prod_{i=1}^{n} PPP_{Bangunan_i}\right)^{\frac{1}{n}}$$

Dengan:

n = Jumlah sistem dalam suatu proyek

Tahap penghitungan terakhir adalah menghitung IKK kabupaten/kota dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot APBD) dengan rumus berikut:



Dengan:

n = Jumlah sistem dalam suatu kabupaten/kota

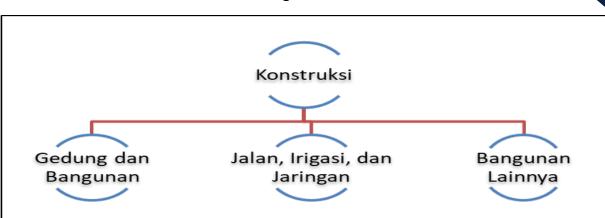
3.4. Penghitungan Diagram Timbang Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

3.4.1. Basket of Construction Components Approach (BOCC)

Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components* (BOCC). Metode pendekatan ini didesain untuk tujuan perbandingan antar wilayah. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah.

Komponen konstruksi adalah output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini adalah semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan. Tujuan penggunaan pendekatan BOCC adalah memberikan perbandingan harga konstruksi yang lebih sederhana dan biaya yang murah dan memungkinkan menggunakan metode *Bill of Quantity* (BOQ).

Pendekatan BOCC didasarkan pada harga 2 jenis komponen, yakni komponen gabungan dan input dasar. Selanjutnya untuk tujuan estimasi perbandingan antar wilayah, komponen-komponen tersebut dikelompokan dalam bentuk sistem-sistem konstruksi. Sistem-sistem tersebut selajutnya dikelompokkan ke dalam *basic heading*. Sektor konstruksi diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yang disebut sebagai *basic heading* sebagaimana pada gambar berikut.



Gambar 1. Kategori Sektor Konstruksi

Sumber: BPS, Buku Pedoman Penyusunan Bill of Quantity

Gedung dan Bangunan yang termasuk dalam lingkup penghitungan diagram timbang IKK adalah sebagai berikut:

- 1. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, *real estate*, rumah susun, dan perumahan dinas.
- 2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun dan bangunan monumental.

Klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan yang termasuk dalam penghitungan diagram timbang adalah sebagai berikut:

- 1. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian
 - Bangunan pengairan, meliputi: pembangunan waduk (reservoir), bendung (weir),
 embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, check dam, tanggul
 pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan waduk.
 - Bangunan tempat proses hasil pertanian, meliputi: bangunan penggilingan, dan bangunan pengeringan.
- 2. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan
 - Bangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan,

marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.

- Bangunan jalan dan jembatan kereta.
- Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/ pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.
- Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi
- Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi dan transmisi tegangan tinggi.
- Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
- Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
- Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telefon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/ penerima radar *microwave*, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.
- Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah dan saluran drainase pada gedung.
- Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
- Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
- Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
- Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.

Sedangkan jenis bangunan yang tercakup dalam klasifikasi bangunan lainnya adalah sebagai berikut: bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi *prefab* dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

3.4.2. Sistem Konstruksi

Sistem menurut konsep pendekatan BOCC adalah suatu kumpulan komponen dalam suatu proyek konstruksi yang dapat menjalankan suatu fungsi tertentu. Sistem adalah struktur dalam sebuah bangunan yang diklasifikasikan kembali kedalam kumpulan komponen bertujuan untuk mendukung bangunan seperti pondasi, atap, eksterior dan interior, dan lainnya. Sistem konstruksi pada bangunan rumah dan gedung berbeda dengan klasifikasi jenis bangunan lainnya. Berikut adalah jenis sistem untuk bangunan rumah dan gedung, dan sistem untuk klasifikasi jenis bangunan lainnya.

a. Sistem Konstruksi untuk Bangunan Rumah dan Gedung

Tabel 1. Penjelasan Sistem Konstruksi untuk Bangunan Rumah dan Gedung

Nama Sistem	Penjelasan Sistem								
(1)	(2)								
Site-work (Persiapan)	Sistem yang berisi komponen konstruksi yang berhubungan								
	dengan pekerjaan persiapan dalam rangka pembangunan								
	suatu proyek.								
Substructure	Sistem yang berisi komponen struktur dan jenis pekerjaan								
	dibawah permukaan tanah. Sistem ini menahan semua beban								
	bagian bangunan yang berada di atasnya seperti balok, atap								
	dan lainnya.								
Superstructure	Sistem yang meliputi komponen struktur dan jenis pekerjaan								
	di atas permukaan tanah. Sistem ini menahan beban bagian								
	bangunan di atasnya.								

Lanjutan Tabel 1. Penjelasan Sistem Konstruksi untuk Bangunan Rumah dan Gedung

Nama Sistem	Penjelasan Sistem								
(1)	(2)								
Exterior Shell/	Sistem yang berisi komponen konstruksi yang menyelimuti								
Building Envelope	bangunan (atap). Bangunan ini memberi beban pada sistem								
	superstructure pada bangunan.								
Interior Partitions	Sistem yang terdiri dari semua dinding, dan bagian bangunan								
	untuk jalan keluar masuk bangunan.								
Interior and Exterior	Sistem yang meliputi komponen konstruksi yang bertujuan								
Finishes	untuk memperindah bangunan, misalnya pengecatan.								
Mechanical and	Sistem yang meliputi komponen konstruksi yang mengatur								
Plumbing	suhu, saluran air, komunikasi, sistem pemadam kebakaran								
	dan lainnya.								
Electrical	Sistem yang meliputi komponen konstruksi yang								
	berhubungan dengan distribusi listrik dalam sebuah								
	bangunan.								

Sumber: BPS, Buku Pedoman Penyusunan Bill of Quantity

b. Sistem Konstruksi untuk Jenis Bangunan Jalan, Irigasi, Jaringan dan Lainnya

Sistem konstruksi untuk jenis bangunan bangunan Jalan, Irigasi, Jaringan dan lainnya adalah sebagai berikut:

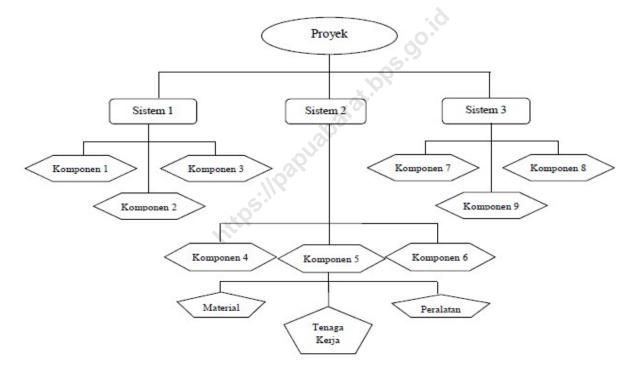
Tabel 2. Penjelasan Sistem Konstruksi untuk Jenis Bangunan Jalan, Irigasi, Jaringan dan Lainnya

Nama Sistem	Penjelasan Sistem								
(1)	(2)								
Site-work (Persiapan)	Sistem yang berisi komponen konstruksi yang berhubungan dengan pekerjaan persiapan dalam rangka pembangunan suatu proyek.								
Substructure	Sistem yang berisi komponen struktur dan jenis pekerjaan dibawah permukaan tanah. Sistem ini menahan semua beban dari struktur/bagian bangunan yang berada di atasnya.								
Superstructure	Sistem yang meliputi komponen struktur dan jenis pekerjaan diatas permukaan tanah. Sistem ini menahan beban bagian bangunan di atasnya.								
Mechanical Equipment	Perlengkapan mekanik yang dipasang pada suatu bangunan seperti pompa, turbin, pipa penghubung, tower pendingin, dan lainnya.								
Electrical Equipment	Peralatan yang terpasang pada bangunan yang digunakan untuk sistem distribusi tenaga listrik, distribusi panel, pusat kontrol pencahayaan, komunikasi dan lainnya.								
Underground Utility	Jaringan bawah tanah, sistem atau fasilitas yang digunakan untuk memproduksi, menyimpan, transmisi dan distribusi komunikasi atau telekomunikasi, listrik, gas, minyak bumi, saluran pembuangan akhir, dan lainnya. Peralatan ini termasuk pipa, kabel, fiber optic cable, dan lainnya yang terpasang dibawah permukaan tanah.								

Sumber: BPS, Buku Pedoman Penyusunan Bill of Quantity



Komponen adalah kombinasi dari beberapa material pada lokasi akhir yang dapat diidentifikasikan secara jelas pada tujuannya dalam sebuah proyek bangunan dan juga sistemnya. Contoh komponen adalah beton, pengecatan eksterior, pengecatan interior, pondasi kolom, dan lainnya. Sebuah komponen secara umum terdiri dari beberapa material, tenaga kerja dan peralatan.



Gambar 2. Hubungan antara Proyek, Sistem dan Komponen

Sumber: BPS, Buku Pedoman Penyusunan Bill of Quantity

Biaya masing-masing komponen disusun dari biaya per unit dari material yang digunakan dan perkiraan kuantitas dari material, koefisien dan upah tenaga kerja, koefisien dan sewa peralatan yang digunakan untuk membangun komponen tersebut. Konsep yang mendasar dari pendekatan BOCC adalah mengukur relatif harga pada level komponen konstruksi. Sebuah komponen kemudian dibagi-bagi kembali kedalam beberapa item pekerjaan konstruksi.

Komponen konstruksi dapat dianggap sebagai agregasi dari beberapa item pekerjaan konstruksi yang meliputi material, tenaga kerja, dan peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan item pekerjaan tersebut.

Komponen-komponen yang digunakan dalam penghitungan diagram timbang IKK berbeda antara bangunan 1 (bangunan tempat tinggal) dan bangunan 2 (bangunan umum untuk pertanian, bangunan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan, bangunan umum untuk jaringan air, listrik, dan komunikasi), bangunan 3 (bangunan lainnya).

Pendekatan BOCC menggunakan 3 sistem penimbang. Macam-macam jenis penimbang tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. W1 adalah penimbang yang digunakan pada level agregasi jenis bangunan seperti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan umum untuk pertanian, jalan, jembatan, dan jaringan, dan bangunan lainnya.
- 2. W2 adalah penimbang untuk agregasi pada level sistem konstruksi.
- 3. W3 adalah penimbang untuk agregasi pada level komponen yang termasuk upah tenaga kerja dan sewa peralatan konstruksi.

3.4.4. Prosedur Penghitungan Penimbang

Langkah awal yang dilakukan untuk menghitung penimbang IKK adalah mengumpulkan *Bill of Quantity* (BoQ). Pengumpulan BoQ ini dilakukan melalui survei diagram timbang IKK tahun 2019, 2020 dan 2021. BoQ yang dikumpulkan dalam survei ini adalah BoQ realisasi pembangunan suatu konstruksi selama tahun 2019, 2020 dan 2021 di kabupaten/kota yang bersangkutan. BoQ ini dikumpulkan dari masing-masing kabupaten/kota agar setiap kabupaten/kota memiliki penimbang yang sesuai dengan karakteristik pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Tahapan penghitungan diagram timbang dari data BoQ untuk masing-masing kabupaten-kota adalah sebagai berikut:

1. Pengkodean Data BoQ

Pengkodean merupakan langkah awal yang dilakukan dalam pengolahan data BoQ. Terdapat beberapa macam kode yang diberikan, diantaranya:

- a. Melakukan pengkodean jenis bangunan dan kabupaten/kota untuk masing-masing jenis dokumen BoQ yang dikumpulkan.
- Melakukan pengkodean sistem pada setiap uraian pekerjaan yang terdapat dalam BoQ.
- c. Melakukan pengkodean jenis komponen dari setiap uraian pekerjaan yang terdapat dalam BoQ.

Setiap uraian pekerjaan BoQ terdapat volume, harga, dan nilai dari beberapa bahan bangunan, tenaga kerja yang digunakan, dan sewa peralatan.

Gambar 3. Contoh Pemberian Kode pada Dokumen BoQ

		Volume Pekerjaan	Jumlah Harga		Kode Barang	Analisis Harga				
Komponen	Nilai Proyek						Bobot kompo nen (Vol 🔻		Harga	Nilai
III. PEKERJAAN PASANGAN	-									0
1 Pas.Batu kosong	5,049,453.60	14.88	339,345.00	2	1302	Batu kali	1.2	m3	190,000	228,000
	-			2		Pasir urug	0.432	m3	130,000	56,160
	:-			2	5600	Pekerja	0.78	oh	40,000	31,200
	:- :			2	5300	Tukang batu	0.39	oh	50,000	19,500
	-			2	5200	Kepala tukang batu	0.039	oh	55,000	2,145
	:-			2		Mandor	0.039	ОН	60,000	2,340
2 Pas.Batu kali 1:5 Ps Karung asem	23,424,094.45	39.53	592,565.00	3	1302	Batu kali	1.1	m3	190,000	209,000
				3	2000	Semen porland	136	kg	1,200	163,200
	8.5			3	1201	Pasir pasang ex karang asa	0.544	m3	210,000	114,240
	1.7			3	5600	Pekerja	1.5	oh	40,000	60,000
	3.			3	5300	Tukang batu	0.75	oh	50,000	37,500
	97.0			3	5200	Kepala tukang batu	0.075	oh	55,000	4,125
	57			3		Mandor	0.075	oh	60,000	4,500

Sumber: BPS, Buku Pedoman Penyusunan Bill of Quantity

2. Menghitung Masing-Masing Tahapan Penimbang Setiap Kabupaten/Kota

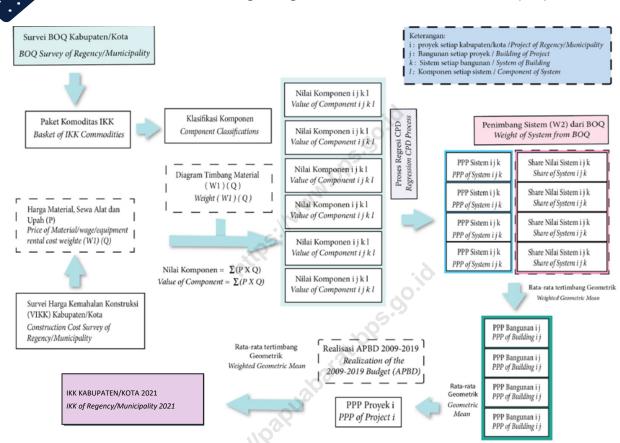
Penimbang untuk penghitungan IKK yang berasal dari data BoQ ada dua jenis penimbang yakni penimbang material dan penimbang sistem. **Penimbang material** digunakan untuk menghitung nilai komponen yaitu **volume** dari material, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi. Penimbang sistem digunakan untuk menghitung PPP bangunan yaitu **share** nilai sistem dari setiap sistem yang ada dalam suatu bangunan.

Selain dari data BoQ, penghitungan IKK 2021 juga menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019-2021. Penimbang realisasi APBD digunakan untuk tahap proyek.

Secara garis besar proses penghitungan IKK 2021 melalui beberapa tahapan, diantaranya:

- Mencari paket komoditas, klasifikasi komponen, dan diagram timbang material dari data BoQ.
- 2. Menghitung nilai komponen yakni rata-rata tertimbang aritmatika antara data harga hasil survei harga IKK (VIKK) dengan diagram timbang material.
- 3. Melakukan regresi CPD dari keseluruhan nilai komponen setiap proyek, bangunan, dan sistem untuk memperoleh PPP sistem.
- 4. Melakukan rata-rata tertimbang geometrik antara PPP sistem dengan penimbang sistem setiap proyek dan bangunan untuk memperoleh PPP bangunan.
- 5. Melakukan rata-rata geometrik dari PPP bangunan untuk memperoleh PPP Proyek.
- 6. Melakukan rata-rata tertimbang geometrik antara PPP Proyek dengan rata-rata data realisasi APBD tahun 2019-2020 untuk memperoleh angka IKK.

Proses penghitungan IKK 2021 secara keseluruhan beserta dengan penggunaan penimbang dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 4. Proses Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Sumber: BPS, Buku Pedoman Penyusunan Bill of Quantity

3.4.5. Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBD. Tujuan DAU salah satunya sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun Dama Alokasi Umum terdiri dari:

- 1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi,
- 2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten.

Persentase pembagian DAU antar provinsi dan kabupaten/kota sebesar 10 persen dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Provinsi dan 90 persen dari total DAU Nasional dialokasikan kepada kabupaten/kota. Penghitungan besaran DAU secara nasional yaitu minimal sebesar 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto (PPDN Netto). Setiap provinsi/kabupaten/kota menerima DAU dengan besaran yang tiidak sama. Daerah dimungkinkan mendapatkan DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan DAU tahun sebelumnya. Bahkan dibeberapa daerah yang memiliki kapasitas fiskal sangat besar dimungkinkan untuk tidak mendapatkan DAU (DAU = 0).

https://papuabarat.bps.do.id



BAB IV PEMBAHASAN RINGKAS

https://papuabarat.bps.go.id

BAB IV

PEMBAHASAN RINGKAS

4.1. Gambaran Umum Provinsi Papua Barat

Kondisi Geografis

Provinsi Papua Barat terletak di pulau Papua, berbatasan langsung dengan Provinsi Papua yang merupakan provinsi ujung timur Indonesia. Secara astronomis, letak Provinsi Papua Barat antara 0^0 — 4^0 Lintang Selatan dan antara 24^0 — 132^0 Bujur Timur. Adapun batas-batas geografis Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

Utara : Samudera Pasifik

Selatan : Laut Banda, Provinsi Maluku

Barat : Laut Seram, Provinsi Maluku

Timur : Provinsi Papua

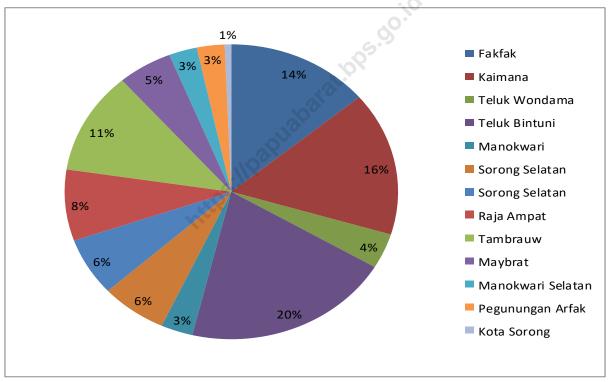
Luas wilayah provinsi Papua Barat secara keseluruhan adalah 102.955,15 km2, yang terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota, yaitu:

- Kabupaten Fakfak
- Kabupaten Kaimana
- Kabupaten Teluk Wondama
- Kabupaten Teluk Bintuni
- Kabupaten Manokwari
- Kabupaten Sorong Selatan
- Kabupaten Sorong
- Kabupaten Raja Ampat
- Kabupaten Tambrauw
- Kabupaten Maybrat

- Kabupaten Manokwari Selatan
- Kabupaten Pegunungan Arfak
- Kota Sorong

Diantara ke tiga belas kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Teluk Bintuni adalah kabupaten yang memiliki wilayah terluas, yaitu mencapai 20.840,83 km2. Sedangkan Kota Sorong merupakan wilayah yang memiliki luas paling kecil, yaitu 656,64 km2. Berikut ini adalah persentase luas kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.

Gambar 5. Persentase Luas Wilayah Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2021



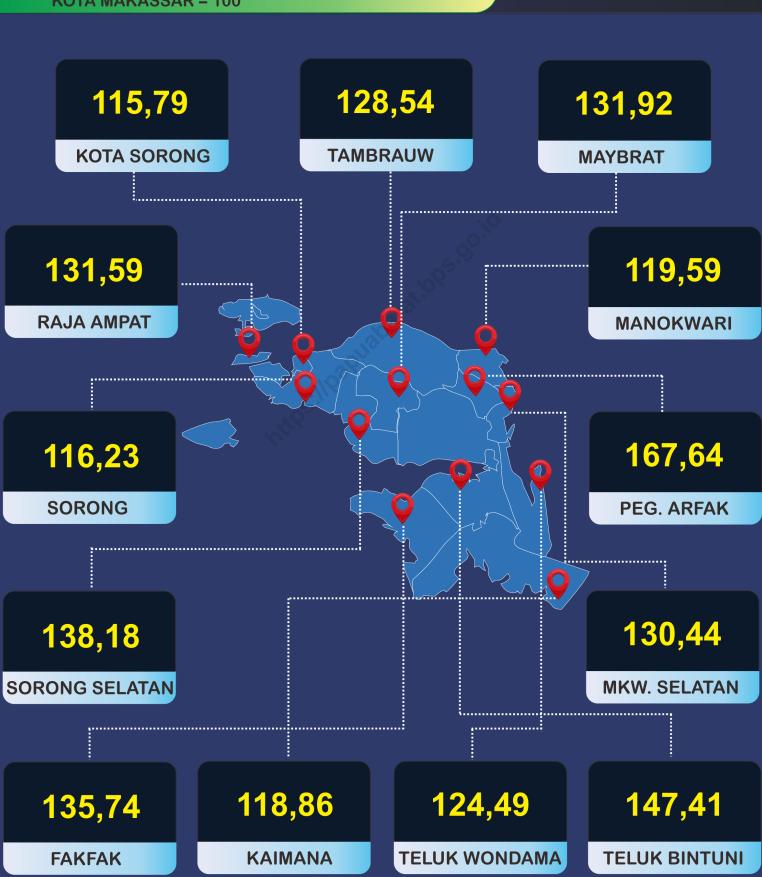
Sumber: Peraturan Mendagri No.137 Tahun 2017

Berdasarkan relief dan topografi, kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat hampir semuanya berbatasan langsung dengan laut. Hanya terdapat dua kabupaten yang wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan laut, yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Maybrat. Hal tersebut tentunya mempermudah akses distribusi barang mengingat akses jalan darat belum sepenuhnya terkoneksi dengan baik antar kabupaten/kota.



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI PROVINSI PAPUA BARAT 2021

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK), 2021 KOTA MAKASSAR = 100



4.2. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi Papua Barat

Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Papua Barat tahun 2021 adalah 130,59. Berikut adalah tabel IKK tahun 2021 berdasarkan provinsi di Indonesia.

Tabel 3. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Berdasarkan Provinsi di Indonesia, 2021

Kode	Provinsi	IKK	Ranking
(1)	(2)	(3)	(4)
1100	Aceh	99,03	14
1200	Sumatera Utara	101,63	21
1300	Sumatera Barat	94,77	8
1400	Sumatera Barat Riau Jambi	94,85	9
1500	Jambi	92,76	5
1600	Sumatera Selatan	91,58	3
1700	Bengkulu	94,42	7
1800	Lampung	92,57	4
1900	Kep. Bangka Belitung	101,21	19
2100	Kepulauan Riau	116,80	30
3100	DKI Jakarta	121,42	31
3200	Jawa Barat	102,60	23
3300	Jawa Tengah	97,65	13
3400	DI Yogyakarta	100,31	17
3500	Jawa Timur	100,80	18
3600	Banten	97,64	12
5100	Bali	103,17	24
5200	Nusa Tenggara Barat	101,93	22
5300	Nusa Tenggara Timur	93,58	6
6100	Kalimantan Barat	111,45	28

Lanjutan Tabel 3. Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK) berdasarkan Provinsi di Indonesia, 2021

Kode	Provinsi	IKK	Ranking
(1)	(2)	(3)	(4)
6200	Kalimantan Tengah	101,47	20
6300	Kalimantan Selatan	99,25	15
6400	Kalimantan Timur	109,81	27
6500	Kalimantan Utara	106,00	26
7100	Sulawesi Utara	104,43	25
7200	Sulawesi Tengah	90,50	1
7300	Sulawesi Selatan	96,84	11
7400	Sulawesi Tenggara	99,38	16
7500	Gorontalo	95,07	10
7600	Sulawesi Barat	90,72	2
8100	Maluku	124,61	32
8200	Maluku Utara	112,31	29
9100	Papua Barat	130,59	33
9400	Papua	207,11	34

Sumber: BPS, Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK)

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa di antara 34 provinsi di Indonesia, IKK Provinsi Papua Barat berada di posisi ke 33 dengan nilai IKK yaitu 130,59. Hanya ada satu provinsi yang mempunyai IKK lebih tinggi dari Provinsi Papua Barat, yaitu Provinsi Papua dengan nilai indeks 207,11. Provinsi IKK tertinggi tertinggi ketiga adalah Provinsi Maluku dengan IKK sebesar 124,61. Sementara itu, tiga provinsi dengan IKK terendah yaitu provinsi Sulawesi Tengah dengan IKK sebesar 90,50; Sulawesi Barat dengan IKK sebesar 90,72; dan Sumatera Selatan dengan IKK sebesar 91,58. Kota yang menjadi acuan (IKK=100) pada IKK tahun 2021 ini berada di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kota Makassar. Pemilihan kota acuan didasarkan pada wilayah yang memiliki indeks mendekati indeks rata-rata nasional dengan mempertimbangkan kelengkapan sumber data.

Tabel 4. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi Papua Barat, 2017-2021

Provinsi	IKK 2017	IKK 2018	IKK 2019	IKK 2020	IKK 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Papua Barat	140,04	134,02	132,67	129,66	130,59

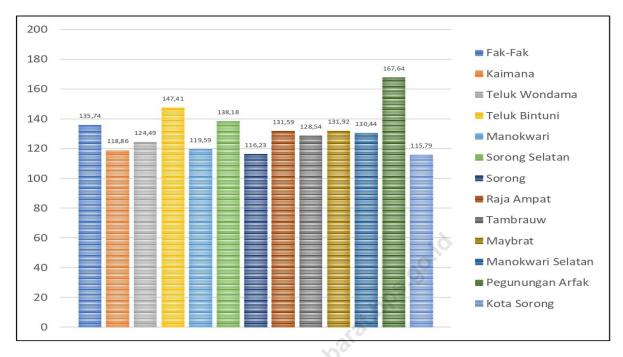
Sumber: BPS, Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK)

Kota acuan IKK 2021 adalah Kota Makassar (IKK= 100). Pada dasarnya, IKK dapat menunjukkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi antar wilayah dalam satu waktu. Berdasarkan penghitungan IKK tahun 2021, IKK Provinsi Papua Barat menempati posisi 33 dari 34 provinsi di Indonesia. Hanya ada satu provinsi yang memiliki IKK lebih tinggi, yaitu Papua. Hal ini menunjukkan bahwa harga barang ataupun jasa konstruksi di Papua Barat pada umumnya lebih mahal dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, kecuali Provinsi Papua.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi mahalnya harga barang dan jasa konstruksi di suatu wilayah, diantaranya adalah kondisi geografis, akses transportasi, jumlah pedagang besar di daerah tersebut dan lain sebagainya. Tingginya angka IKK Provinsi Papua Barat pada umumnya disebabkan oleh tingginya barang-barang konstruksi, khususnya barang konstruksi hasil pabrik yang harus didatangkan dari luar wilayah. Kondisi geografis kabupaten/kota di Papua Barat yang masih belum terhubung dengan baik antar kabupaten/kota semakin membuat harga barang-barang konstruksi semakin tinggi. Selain itu, sulitnya akses transportasi di beberapa kabupaten membuat adanya disparitas IKK antar kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.

Dari tiga belas kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, tiga kabupaten/kota yang memiliki IKK tertinggi ditahun 2021 adalah Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 167,64; Kabupaten Teluk Bintuni 147,41; dan Kabupaten Sorong Selatan sebesar 138,18. Sedangkan tiga kabupaten/kota yang memiliki IKK terendah yaitu Kota Sorong sebesar 115,79; Kabupaten Sorong 116,23; dan Kabupaten Kaimana sebesar 118,86.

Gambar 6. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021



Sumber: BPS, Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK)

4.3. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi Papua Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota

4.3.1. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Fakfak Tabel 5. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Fakfak, 2017-2021

Tahun	IKK	Rank
(1)	(2)	(3)
2017	135,50	7
2018	135,83	9
2019	129,89	9
2020	126,32	6
2021	135,74	10

Sumber: BPS, Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK)

IKK kabupaten Fakfak pada tahun 2021 adalah sebesar 135,74 dan menempati peringkat 10 di Provinsi Papua Barat. Peringkat tersebut lebih rendah dibandingkan dengan peringkat IKK Kabupaten Fakfak di tahun 2020. Jika melihat data IKK dalam lima tahun terakhir, harga barang atau jasa konstruksi secara keseluruhan di Kabupaten Fakfak tergolong ditingkat menengah, dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Papua Barat.

Kabupaten Fakfak memiliki infrastruktur pelabuhan dan bandara yang dapat menjadi jalur masuk arus barang ke kabupaten ini. Akan tetapi untuk arus barang dalam jumlah besar, pada umumnya melalui jalur laut karena dapat memuat barang dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan melalui jalur udara. Arus barang dari Kabupaten Fakfak bervariasi, tetapi pada umumnya barang-barang didatangkan langsung dari luar provinsi.

4.3.2. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Kaimana Tabel 6. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Kaimana, 2017-2021

Tahun	IKK	Rank
(1)	(2)	(3)
2017	133,64	6
2018	124,79	5
2019	121,24	3
2020	123,48	4
2021	118,86	3

Sumber: BPS, Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK)

IKK kabupaten Kaimana pada tahun 2021 adalah sebesar 118,86 yang menempatkan kabupaten ini berada di peringkat ke 3 di Provinsi Papua Barat. Peringkat tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang berada di peringkat ke 4. Itu berarti harga barang ataupun jasa konstruksi di kabupaten Kaimana pada tahun 2021 secara rata-rata lebih murah jika

dibandingkan dengan harga barang ataupun jasa konstruksi di kabupaten/kota lain di Papua Barat. Hanya Kota Sorong dan Kabupaten Sorong yang memiliki harga barang ataupun jasa konstruksi yang secara rata-rata lebih murah daripada Kabupaten Kaimana.

Sama halnya dengan kabupaten Fakfak, kabupaten Kaimana memilki sarana pelabuhan dan bandara yang menjadi jalur masuk arus barang ke Kabupaten Kaimana. Arus barang dalam jumlah besar umumnya melalui jalur laut. Barang-barang yang masuk ke kabupaten Kaimana pada umumnya didatangkan dari luar provinsi.

4.3.3. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Teluk Wondama Tabel 7. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Teluk Wondama, 2017-2021

Tahun	IKK	Rank
(1)	(2)	(3)
2017	131,98	5
2018	124,62	4
2019	122,57	4
2020	127,67	7
2021	124,49	5

Sumber: BPS, Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK)

IKK Kabupaten Teluk Wondama tahun 2021 adalah sebesar 124,49 dan menempati peringkat ke 5 di Provinsi Papua Barat. Peringkat tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan peringkat tahun sebelumnya. Dengan berada di peringkat ke 5, itu berarti rata-rata harga barang ataupun jasa konstruksi di kabupaten ini pada tahun 2021 tergolong ditingkat menengah jika dibandingkan dengan rata-rata harga barang ataupun jasa konstruksi di kabupaten/kota lain yang berada di Provinsi Papua Barat.

Kabupaten Teluk wondama memiliki sarana pelabuhan yang menjadi jalur utama arus masuk barang. Sedangkan untuk transportasi barang ataupun kargo lewat jalur udara, fasilitas di Kabupaten Teluk Wondama masih belum cukup memadai dan selama tahun 2021 hanya mengakomodasi pesawat kecil seperti *Susi Air*. Jalur arus barang yang masuk ke Kabupaten Teluk Wondama sebagian besar didatangkan langsung dari luar provinsi.

4.3.4. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Teluk Bintuni Tabel 8. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Teluk Bintuni, 2017-2021

Tahun	IKK	Rank
(1)	(2)	(3)
2017	147,63	11
2018	146,40	12
2019	156,26	12
2020	139,24	12
2021	147,41	12

Sumber: BPS, Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK)

IKK kabupaten Teluk Bintuni tahun 2021 adalah sebesar 147,21 sekaligus menempatkan kabupaten ini berada di peringkat ke 12 dan termasuk dalam kabupaten dengan IKK tertinggi kedua di Provinsi Papua Barat. Peringkat tersebut masih sama dengan tahun 2020. Peringkat ke 12 menunjukkan bahwa harga barang ataupun jasa konstruksi di kabupaten ini secara rata-rata cenderung lebih mahal jika dibandingkan sebagian besar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat. Kabupaten yang memiliki rata-rata harga lebih mahal dari Kabupaten Teluk Bintuni hanya Kabupaten Pegunungan Arfak.

Kabupaten Teluk Bintuni memiliki sarana pelabuhan dan bandara. Akan tetapi, bandara kabupaten Teluk Bintuni masih belum cukup memadai dan hanya mampu mengakomodasi

pesawat kecil seperti Susi Air. Arus barang yang masuk ke kabupaten Teluk Bintuni pada umumnya melalui jalur laut. Sedangkan jalur darat umumnya digunakan untuk arus barang dari kabupaten terdekat seperti Manokwari, dikarenakan jalur udara yang masih kurang memadai. Jalur arus barang yang masuk ke kabupaten Teluk Bintuni pada umumnya didatangkan dari luar provinsi dan ada beberapa juga yang didatangkan dari kabupaten sekitar yang terdekat.

4.3.5. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Manokwari Tabel 9. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Manokwari, 2017-2021

Tahun	IKK	Rank
(1)	(2)	(3)
2017	131,26	4
2018	120,93	2
2019	120,13	2
2020	120,92	3
2021	119,59	4

Sumber: BPS, Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK)

IKK Kabupaten Manokwari tahun 2021 adalah sebesar 119,59 dan menempati peringkat ke 4 di Provinsi Papua Barat. Peringkat tersebut lebih rendah dibandingkan peringkat di tahun 2020. Dengan menduduki peringkat ke 4, hal ini menunjukkan rata-rata harga barang ataupun jasa di Kabupaten Manokwari cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Papua Barat. Hanya Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Kaimana yang memiliki harga barang ataupun jasa konstruksi yang rata-rata lebih rendah dari pada Kabupaten Manokwari.

Kabupaten Manokwari merupakan ibukota Provinsi Papua Barat. Kabupaten Manokwari memiliki sarana pelabuhan dan bandara yang mendukung pergerakan arus barang

yang masuk ke kabupaten ini. Pelabuhan yang memadai memudahkan pedagang untuk mendatangkan barang-barang dalam jumlah besar melalui jalur laut. Arus barang di kabupaten Manokwari lancar dengan didukung sarana transportasi yang cukup memadai tersebut. Barang-barang yang masuk ke kabupaten Manokwari pada umumnya didatangkan langsung dari luar provinsi Papua Barat.

4.3.6. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Sorong Selatan Tabel 10. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Sorong Selatan, 2017-2021

Tahun	IKK	Rank
(1)	(2)	(3)
2017	125,79	3
2018	124,54	3
2019	129,04	7
2020	128,36	8
2021	138,18	11

Sumber: BPS, Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK)

IKK Kabupaten Sorong Selatan tahun 2021 adalah sebesar 138,18 dan menempati peringkat ke 11. Peringkat tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Dengan menempati peringkat ke 11, itu berarti rata-rata harga barang ataupun jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Sorong Selatan cenderung berada di golongan tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata harga barang ataupun jasa di kabupaten/kota lain yang berada di Provinsi Papua Barat. Kabupaten yang memiliki rata-rata harga lebih mahal dari Kabupaten Sorong Selatan hanya Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

Kabupaten Sorong Selatan memiliki sarana bandara, akan tapi bandara tersebut masih belum cukup memadai untuk mengakomodasi pesawat maskapai-maskapai besar dan hanya mampu mengakomodasi pesawat kecil seperti Susi Air. Sehingga jalur transportasi utama Kabupaten Sorong Selatan adalah jalur darat. Kondisi jalur darat dari Kota Sorong ke Kabupaten Sorong Selatan tergolong cukup baik yang mendukung pergerakan arus barang ke kabupaten tersebut. Arus masuk barang ke kabupaten Sorong pada umumnya berasal dari kota Sorong.

4.3.7. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Sorong Tabel 11. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Sorong, 2017-2021

Tahun	IKK	Rank
(1)	(2)	(3)
2017	118,76	2
2018	128,49	7
2019	127,39	6
2020	119,93	2
2021	116,23	2

Sumber: BPS, Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK)

IKK Kabupaten Sorong pada tahun 2021 yaitu sebesar 116,23 sekaligus menempatkan Kabupaten Sorong menduduki peringkat ke 2 di Provinsi Papua Barat. Peringkat IKK Kabupaten Sorong tahun 2021 sama dengan peringkat untuk tahun 2020. Dengan menduduki peringkat kedua, hal ini menunjukkan harga barang ataupun jasa konstruksi di Kabupaten Sorong lebih murah dibandingkan harga barang ataupun jasa konstruksi diberbagai kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Hanya Kota Sorong yang memiliki peringkat IKK lebih tinggi dari Kabupaten Sorong.

Jarak Kabupaten Sorong yang sangat dekat dengan Kota Sorong mempermudah arus masuk barang di Kabupaten Sorong. Pada umumnya barang-barang di Kabupaten Sorong diambil dari Kota Sorong dan juga ada yang didatangkan langsung dari luar dengan jalur pengiriman melalui pelabuhan Kota Sorong dan pelabuhan Kabupaten Sorong. Mudahnya akses transportasi menekan biaya transportasi sehingga harga barang-barang di Kabupaten Sorong cenderung mendekati harga di Kota Sorong.

4.3.8. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Raja Ampat

Tabel 12. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Raja Ampat, 2017-2021

Tahun	IKK	Rank
(1)	(2)	(3)
2017	142,91	9
2018	140,26	10
2019	131,12	10
2020	125,22	5
2021	131,59	8

Sumber: BPS, Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK)

IKK Kabupaten Raja Ampat tahun 2021 adalah sebesar 131,59 sekaligus menempatkan kabupaten ini di peringkat ke 8 se Provinsi Papua Barat. Peringkat IKK di tahun 2021 lebih rendah dari pada peringkat IKK tahun sebelumnya. Berada diperingkat ke 8 menunjukkan bahwa rata-rata harga barang ataupun jasa konstruksi di Kabupaten Raja Ampat tergolong ditingkat menengah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Papua Barat.

Kabupaten Raja Ampat memiliki sarana pelabuhan dan bandara. Pelabuhan menjadi sarana utama untuk akses dari dan ke luar kabupaten Raja Ampat. Untuk mencapai Kabupaten Raja Ampat lebih mudah melalui kota Sorong dengan jalur laut. Terdapat beberapa komoditas di Kabupaten Raja Ampat yang didatangkan dari luar provinsi melalui jalur laut. Akan tetapi pada umumnya barang-barang di kabupaten tersebut didatangkan dari Kota Sorong melalui jalur laut.

4.3.9. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Tambrauw Tabel 13. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Tambrauw, 2017-2021

Tahun	IKK	Rank
(1)	(2)	(3)
2017	162,05	12
2018	140,90	11
2019	129,16	8
2020	128,92	9
2021	128,54	6

Sumber: BPS, Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK)

IKK Kabupaten Tambrauw pada tahun 2021 adalah 128,54 yang menempatkan Kabupaten Tambrauw menduduki peringkat ke 6 di Provinsi Papua Barat. Peringkat tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang menduduki peringkat 9. Berada diperingkat 6 menunjukkan bahwa rata-rata harga barang ataupun jasa konstruksi di Kabupaten Tambraw tergolong ditingkat menengah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Papua Barat.

Kabupaten Tambrauw merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Papua Barat. Sebelumnya, Kabupaten Tambrauw merupakan bagian dari Kabupaten Sorong. Kondisi geografis yaitu jarak yang jauh, yang menyebabkan mahalnya biaya transportasi dan akhirnya berdampak pada tingginya harga barang-barang termasuk bahan-bahan konstruksi.

Arus masuk barang ke Kabupaten Tambrauw pada umumnya berasal langsung dari Kota Sorong, yang disalurkan melalui jalur darat maupun laut terutama untuk barang-barang konstruksi hasil pabrik.

4.3.10. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Maybrat

Tabel 14. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Maybrat, 2017-2021

Tahun	IKK	Rank
(1)	(2)	(3)
2017	137,56	8
2018	125,43	6
2019	122,57	5
2020	132,47	11
2021	131,92	9

Sumber: BPS, Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK)

IKK Kabupaten Maybrat pada tahun 2021 yaitu sebesar 131,92 dan menempati peringkat ke 9. Peringkat IKK Kabupaten Maybrat tahun 2021 lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang menempati peringkat ke 11. Dengan menduduki peringkat ke 9 di Provinsi Papua Barat, hal ini menunjukkan bahwa harga barang ataupun jasa konstruksi di kabupaten ini cenderung lebih mahal daripada rata-rata harga barang ataupun jasa konstruksi pada sebagian besar kabupaten/kota lainnya di Provinsi Papua Barat.

Kabupaten Maybrat merupakan salah satu kabupaten pemekaran, yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Sorong Selatan. Arus masuk barang dari kabupaten Maybrat pada umumnya langsung dari Kota Sorong, dan beberapa juga diambil dari kabupaten terdekat yaitu Kabupaten Sorong Selatan.

4.3.11. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Manokwari Selatan Tabel 15. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Manokwari Selatan, 2017-2021

Tahun	IKK	Rank
(1)	(2)	(3)
2017	143,12	10
2018	133,96	8
2019	146,32	11
2020	130,37	10
2021	130,44	7

Sumber: BPS, Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK)

IKK Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2021 adalah sebesar 130,44 dengan peringkat ke 7. Peringkat IKK Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2021 lebih tinggi dari tahun 2020 yang menduduki peringkat ke 10. Kabupaten Manokwari Selatan juga merupakan kabupaten pemekaran yang sebelumnya menjadi bagian dari Kabupaten Manokwari. Bila dibandingkan dengan Kabupaten Pegunungan Arfak yang juga merupakan pemekaran dari Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan lebih dekat ke Kabupaten Manokwari sehingga arus distribusi barang lebih mudah dibandingkan Kabupaten Pegunungan Arfak. Pembangunan sarana jalan darat untuk jalur transportasi dari Kabupaten Manokwari Selatan menuju ke Manokwari terus mengalami peningkatan, sehingga mempermudah arus barang ke Kabupaten Manokwari Selatan. Pada umumnya barang-barang di Kabupaten Manokwari Selatan berasal dari Kabupaten Manokwari melalui jalur darat.

4.3.12. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Pegunungan Arfak Tabel 16. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Pegunungan Arfak, 2017-2021

Tahun	IKK	Rank
(1)	(2)	(3)
2017	213,02	13
2018	188,95	13
2019	192,80	13
2020	185,70	13
2021	167,64	13

Sumber: BPS, Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK)

Kabupaten Pegunungan Arfak merupakan salah satu kabupaten pemekaran baru yang sebelumnya menjadi bagian dari Kabupaten Manokwari. Selama 5 tahun terakhir Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi kabupaten yang memiliki IKK tertinggi se-Provinsi Papua Barat. IKK Kabupaten Pegunungan Arfak tahun 2021 sebesar 167,64. Hal ini menunjukkan bahwa harga barang ataupun jasa konstruksi di kabupaten ini merupakan yang paling mahal di Provinsi Papua Barat.

Akses transportasi menuju kabupaten Pegunungan Arfak saat ini hanya melalui jalan darat dari Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan. Kondisi geografis yaitu jarak yang jauh dengan kondisi jalan yang masih kurang baik, serta akses transportasi menuju kabupaten tersebut yang masih cukup sulit menyebabkan biaya transportasi menjadi tinggi sehingga berdampak pada mahalnya barang-barang di Kabupaten Pegunungan. Selain itu, belum ada transportasi reguler dengan jadwal yang pasti dari kabupaten Manokwari menuju Kabupaten Pegunungan Arfak sehingga untuk menuju kabupaten tersebut harus menyewa kendaraan. Hal ini menyebabkan biaya transportasi menjadi mahal.

4.3.13. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Sorong

Tabel 17. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Sorong, 2017-2021

Tahun	IKK	Rank
(1)	(2)	(3)
2017	118,56	1
2018	119,87	1
2019	113,03	1
2020	109,25	1
2021	115,79	1

Sumber: BPS, Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK)

Kota Sorong merupakan satu-satunya daerah administratif kota di Provinsi Papua Barat. Diantara 13 kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Papua Barat, Kota Sorong merupakan daerah yang paling berkembang dan padat dengan aktivitas ekonomi. Selama 5 tahun terakhir Kota Sorong merupakan kota dengan IKK terendah di Provinsi Papua Barat atau peringkat IKKnya paling tinggi. IKK Kota Sorong pada tahun 2021 sebesar 115,79. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata harga barang ataupun jasa konstruksi di Kota Sorong adalah yang paling murah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Papua Barat.

Kota Sorong memiliki akses transportasi yang mudah dan bervariasi, mulai dari angkutan darat, laut maupun udara. Kota Sorong memiliki bandara yang memadai dengan jadwal penerbangan setiap hari sehingga memperlancar arus barang yang didatangkan melalui jalur udara. Selain itu Kota Sorong juga memiliki pelabuhan yang menjadi pintu masuk arus barang yang berasal dari luar Provinsi Papua Barat ke dalam Provinsi Papua Barat melalui jalur laut.

Mudahnya akses transportasi di kota Sorong memperlancar pergerakan arus barang yang masuk dan keluar dari Kota Sorong. Di Kota Sorong terdapat distributor yang mendatangkan langsung barang-barang dari produsen di daerah asal barang sehingga toko-toko bangunan di Kota Sorong dapat mengambil langsung barang melalui distributor tersebut tanpa harus mendatangkan sendiri barang-barang tersebut. Hal ini juga mempengaruhi kabupaten-kabupaten di sekitarnya yang pada umumnya mendatangkan barang melalui Kota Sorong.



Badan Pusat Statistik. 2021. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2021.

Badan Pusat Statistik. 2014. Pedoman Pencacahan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Tahun 2021.

Badan Pusat Statistik. 2021. Buku Pedoman Penyusunan Bill of Quantity Tahun 2021.

Peraturan Mendagri No.137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan

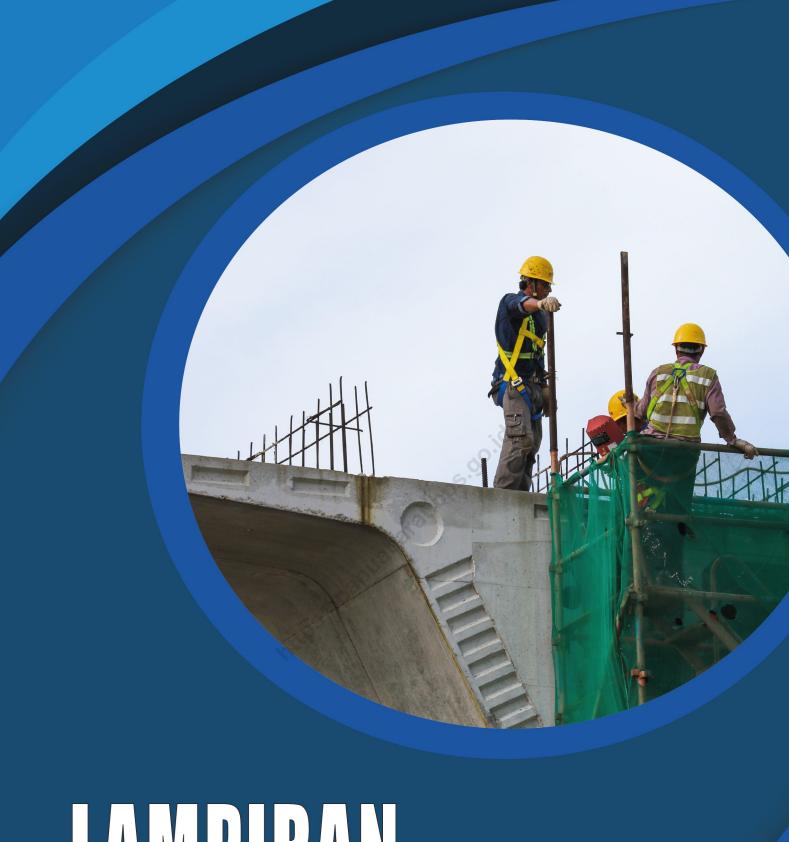
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

https://papuabarat.bps.do.id



LAMPIRAN

https://papuabarat.bps.do.id



VHKK2021.MNPL MATERIAL NATURAL DAN PRODUK LANJUTANNYA

REPUBLIK INDONESIA BADAN PUSAT STATISTIK

SURVEI HARGA KEMAHALAN KONSTRUKSI

PERIODE: APRIL 2021

RAHASIA

PENJELASAN

- Tujuan dari survei ini adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan data harga material, dan produk yang tersedia di lapangan yang identik dengan item yang dideskripsikan pada kuesioner dan buku pedoman.
- Responden adalah pedagang grosir/distributor yang menjual bahan bangunan/konstruksi ke kontraktor/pedagang lain. Jika tidak ada pedagang grosir maka diperbolehkan produsen, pedagang campuran (grosir merangkap eceran), atau pedagang eceran.
- Responden harus berada di ibukota kabupaten/kota dan sekitarnya. Diusahakan responden sama untuk setiap periode pencacahan. Jika terjadi pergantian responden maka dicari penggantinya yang sesuai.
- . Spesifikasi/kualitas barang dipilih berdasarkan prioritas kualitas/merk barang yang telah ditentukan pada kuesioner. Jika tidak ditemukan, cari kualitas yang setara.
- Spesifikasi/kualitas barang setiap periode harus sama. Jika tidak ditemukan kembali spesifikasi/kualitas barang yang lama maka dicari pengganti yang setara. Dokumen yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh petugas pencacah dan

pemeriksa, dipindahkan ke komputer menggunakan program data entri online dari

BPS RI (https://webentry.bps.go.id/shkk).

 Dokumen yang sudah dientri disimpan di BPS Kabupaten/Kota untuk digunakan pada saat rekonsiliasi di BPS Provinsi.

												Dinas PU atau SKPD Lainnya Jasa Penyewaan Alat Berat Pemborong/Kontraktor	
BLOK I: KETERANGAN TEMPAT			: KETERANGAN PETUGAS	Nama Pengawas	NIP Pengawas	Tanggal Pengawas	Tanda Tangan Pengawas	BLOK III : KETERANGAN RESPONDEN				□ Dinas PU atau SKPD Lainny□ Jasa Penyewaan Alat Berat□ Pemborong/Kontraktor	
ANGA			ANGA	5.	9.	7.	ω̈	NGAN				rosir seran	
ETER			TER/					IERA				Pedagang Grosir Produsen Pedagang Eceran	
CI: K			II : KE					. KE				Pedagang Produsen Pedagang	
Ò			BLOK II					=					
ig B	Provinsi	Kabupaten/Kota*)	BL	Nama Pencacah	NIP Pencacah	Tanggal Pencacah	Tanda Tangan Pencacah	BLO	Nama Responden	Alamat Responden	Nomor Telepon/HP	Kategori Responden	Tanda Tangan Responden
	-	2.	5	'.	2.	3.	4		-	2.	6.	4.	5.

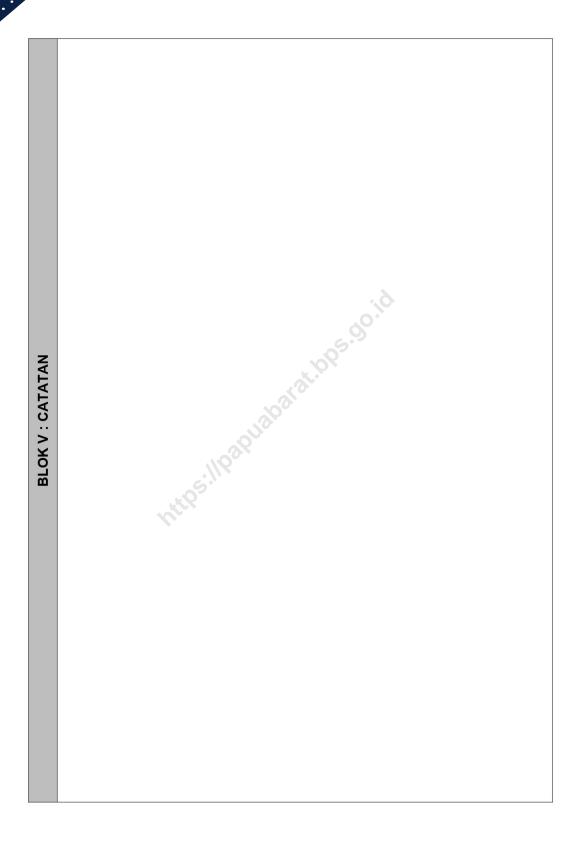
	DELVINENCE OF AM		בואכשכעון פרפטעו	N DENGON I EINING		יובואביא. אוועם וווסאוא אטע, ו ובווו	יוודוו ליטעי	אורויביי בטוואוא	לאותו של פאותו ת	•	
: 2		į		Satuan	Ukuran	Ukuran Satuan Setempat	tempat	Konversi Satuan	Harga per satuan	Harga per satuan	
Komoditas Barang	Kualitas Barang	Satuan Standar	Merek	Setempat (buah, truk, colt, dll)	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Setempat ke Satuan Standar	Setempat Triwulan sebelumnya (Rp)	Setempat Triwulan ini (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)	(11)	(12)
Tanah Uruk ¹⁾	Biasa	m ₃									
(rio-0	Pasir Pasang (Pasir laut, pasir kali)	m³		5:11							
	Pasir Beton/Cor (Pasir gunung)	m ₃		300							
	Batu Kali Utuh	m ₃			70						
Batu Pondasi ¹⁾	Batu Kali Belah	ш			10						
	Batu Gunung	m ₃			•	000					
Batu Bata	Batu Bata tanah Liat (Bata Merah)	m³		Buah		5.0	.0				
	Batako Berlubang (<i>Hollow Block</i>)	ш		Buah			0				
Batako	Batako Tidak Berlubang (<i>Solid Block</i>)	m³		Buah							
Bata Ringan	Cellcon atau Hebel	m ₃									
	Ukuran 1 - 2 cm	m ₃									
Batu Split	Ukuran 2 - 3 cm	m ₃									
	Ukuran 3 - 4 cm	m ₃									

BLOK IV: DATA HARGA MATERIAL NATURAL DAN PRODUK LANJUTANNYA
PRIORITAS RESPONDEN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG
BERMEREK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.

	BEKMEKEN ULA	MAKAN MEN	CACAH SESUA	I DENGAN PEKING	SKAI MEKEK.	JINA IIDAN	ADA, PILIH	MEKER LAINN	BEKMEKER OLAMAKAN MENCACATI SESUAL DENGAN PEKINGKAT MEKER. JINA TIDAN AUA, PILITI MEKEN LAINNYA YANG SELAKA		
7		į		Satuan	Ukuran	Ukuran Satuan Setempat	tempat	Konversi Satuan	Harga per satuan	Harga per satuan	
Nomoditas Barang	Kualitas Barang	Standar	Merek	Setempar (buah, truk, colt, dll)	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Setempat ke Satuan Standar	Setempar Triwulan sebelumnya (Rp)	Setempat Triwulan ini (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)	(11)	(12)
7.101-0	Kayu kelas II	m ₃									
rayu balok	Kayu kelas III	m³		gs.l							
, December 2	Kayu kelas II	m³		60							
rayu rapan-	Kayu kelas III	m³			013						
	Daun pintu (2m x 1m x 4cm)	buah			100	30					
Bahan Bangunan Siap Pasang dari	Daun Jendela (dengan kaca, ukuran 50cm x 120cm)	buah				100	6.05				
Kayu Kelas II	Kusen pintu (2 x 1) m	buah					,(0				
	Kusen jendela (50 x 120) cm	buah									

Keterangan:

¹⁾Tanah uruk, pasir dan batu pondasi merupakan material murni. Harga yang dicacah adalah harga di pusat wilayah, bukan harga di lokasi tambang. ²Uika kolom 5 = Ton, maka kolom 9 wajib terisi dan kolom 6, 7, dan 8 wajib tidak terisi. Jika kolom 5 = Batang/Lembar/M³/Lainnya, maka kolom 6, 7, dan 8 wajib terisi dan kolom 9 wajib tidak terisi.





VHKK2021.MP MATERIAL PABRIKAN

> REPUBLIK INDONESIA BADAN PUSAT STATISTIK

BADAN PUSAI STATISTIK SURVEI HARGA KEMAHALAN KONSTRUKSI

PERIODE: APRIL 2021

RAHASIA

PENJELASAN

Tujuan dari survei ini adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan data harga material, dan produk yang tersedia di lapangan yang identik dengan item yang dideskripsikan pada kuesioner dan buku pedoman.

 Responden adalah pedagang grosir/distributor yang menjual bahan bangunan/konstruksi ke kontraktor/pedagang lain. Jika tidak ada pedagang grosir maka diperbolehkan produsen, pedagang campuran (grosir merangkap eceran), atau pedagang eceran. Responden harus berada di ibukota kabupaten/kota dan sekitarnya. Diusahakan responden sama untuk setiap periode pencacahan. Jika terjadi pergantian responden maka dicari penggantinya yang sesuai. Spesifikasi/kualitas barang dipilih berdasarkan prioritas kualitas/merk barang yang telah ditentukan pada kuesioner. Jika tidak ditemukan, cari kualitas yang setara. Spesifikasi/kualitas barang setiap periode harus sama. Jika tidak ditemukan kembali spesifikasi/kualitas barang yang lama maka dicari pengganti yang setara. Dokumen yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh petugas pencacah dan pemeriksa, dipindahkan ke komputer menggunakan program data entri online dari BPS RI (https://webentry.bps.go.id/shkk). Dokumen yang sudah dientri disimpan di BPS Kabupaten/Kota untuk digunakan pada saat rekonsiliasi di BPS Provinsi.

												KPD Lainnya Alat Berat raktor	
AN TEMPAT			AN PETUGAS	Nama Pengawas	NIP Pengawas	Tanggal Pengawas	Tanda Tangan Pengawas	BLOK III: KETERANGAN RESPONDEN				□ Dinas PU atau SKPD Lainnya□ Jasa Penyewaan Alat Berat□ Pemborong/Kontraktor	
ANG			ANG/	5.	9	7.	ω̈	NGA				rosir ceran	
BLOK I : KETERANGAN TEMPAT			BLOK II: KETERANGAN PETUGAS				.0	(III : KETERA				□ Pedagang Grosir□ Produsen□ Pedagang Eceran	
BL	Provinsi	Kabupaten/Kota*)	PLC BLC	Nama Pencacah	NIP Pencacah	Tanggal Pencacah	Tanda Tangan Pencacah	ВГОК	Nama Responden	Alamat Responden	Nomor Telepon/HP	Kategori Responden	Tanda Tangan Responden
		2.	0	1.	2.	က်	4.		-	2.	3.	4.	5.
		2											

PRIORITAS RESPO	BLOK IV : DATA HARGA MATERIAL PABRIKAN PRIORITAS RESPONDEN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.	SLOK IV USEN 3.PED# ENCACAH SE	BLOK IV : DATA HARGA MATERIAL PABRIKAN DUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HAF IENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK	ARGA NA MERANGKAP ERINGKAT ME	AATERI/ ECERAN 4.PE EREK. JIKA TI	AL PABF DAGANG ECE DAK ADA, PIL	RIKAN ERAN (HARG IH MEREK LA	A TANPA ONGKOS /	ANGKUT). UNTUK BA RA.	ARANG YANG
				Š	turan Satua	Ukuran Satuan Setempat	t t	Harga per satuan	Harga per	
Komoditas Barang	Kualitas Barang	Satuan Standar	Merek	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)	Standar/ Setempat Triwulan sebelumnya (Rp)	satuan Standar/ Setempat Triwulan ini (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(9)	(2)	(8)	(6)	(10)	(11)
Seng Gelombang	Ukuran (0,02 x 80 x 180) cm	lembar		.102						
GAJAH (elephant, angsa, dll)	Ukuran (0,03 x 80 x 180) cm	lembar		PUO						
	Paku Kayu 4"- 6"	<u>\$</u>			25					
	Paku Beton	kg								
ר מאמ	Paku Seng	kg				5				
	Paku Triplek	kg				99				
Semen Portland	Portland Composite Cement (PCC) (SNI 15-7064-2004)	zak					۵			
(gresik, padang, tonasa, dll)	Portland Pozzoland Cement (PPC) (SNI 15-0302-2004)	zak								
Besi Beton (Full) SNI 07-2052-	Besi Beton Polos (BJTP 24) Ukuran d = 6 mm; p = 12 m	batang								
2002	Besi Beton Polos (BJTP 24) Ukuran d = 8 mm; p = 12 m	batang								

BLOK IV : DATA HARGA MATERIAL PABRIKAN PRIORITAS RESPONDEN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONCKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.	Ukuran Satuan Setempat Harga per satuan	Standar/ Setempat Set	(6) (7) (8) (9) (10) (11)										
RGA MATERIAL PA ANGKAP ECERAN 4. PEDAGANG NGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA	Ukuran Satuan Seter			,,,0	3/01/dX	of other	26.						
IV: DATA HA EDAGANG GROSIR MEI 1 SESUAI DENGAN PER		Merek	(4)	D	5)	5)	_						
SLOK USEN 3.P		Satuan Standar	(3)	batang	batang	batang	buah	buah	buah	buah	ш	E	Ε
NDEN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PROD BERMEREK UTAMAKAN ME		Kualitas Barang	(2)	Besi Beton Polos (BJTP 24) Ukuran d = 10 mm; p = 12 m	Besi Beton Ulir (BJTS 32) Ukuran d = 10 mm; p = 12 m	Besi Beton Ulir (BJTS 32) Ukuran d = 16 mm; p = 12 m	Ukuran (55 x 55 x 60) cm / 120 L	Ukuran (60 x 60 x 60) cm / 200 L	Kloset duduk standar (lengkap dengan tabung)	Kloset Jongkok	Seng Plat BJLS 20; L = 45	Seng Plat BJLS 20; L = 60	Seng Plat BJLS 28; L = 90
PRIORITAS RESPO		Komoditas Barang	(1)		Besi Beton (Full) SNI 07-2052- 2002		Bak Mandi	WALRUS (warren, techplas, tison, dll)	Kloset	(wama putin) (ina, duty, dll)		Seng Plat	

BLOK IV : DATA HARGA MATERIAL PABRIKAN BN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG GROSIR ANPA ONGKOS ANGKUT).

				ž	Ukuran Satuan Setempat	n Setempa	,	Harga per satuan	Harga per	
Komoditas Barang	Kualitas Barang	Satuan Standar	Merek	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)	Standar/ Setempat Triwulan sebelumnya (Rp)	satuan Standar/ Setempat Triwulan ini (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)	(11)
	AW & ½" panjang 4 m	batang	5.11							
Pipa PVC	AW ω ¾" panjang 4 m	batang		39						
WAVIN/RUCIKA	AW © 1" panjang 4 m	batang								
(wama putih)	AW © 4" panjang 4 m	batang			N. Carlotte					
(maspion, vinilon, dll)	D ω 3" panjang 4 m	batang			1.0					
	D o 4" panjang 4 m	batang			8	5				
	Triplek / Plywood 3 mm	lembar				99				
Kayu Lapis /	Triplek / Plywood 4 mm	lembar					2			
Triplek	Triplek / Plywood 6 mm	lembar								
	Triplek / <i>Plywood</i> 9 mm	lembar								
Cat Emulsi	Cat Tembok Eksterior	kg								
(wama dasar/putih) (avitex, vinilex, dll)	Cat Tembok Interior	ķg								
Cat Minyak AVIAN (altex, emco, dll)	Cat Besi/Kayu	kg								
Cat Minyak ALTEX (yoko, kembang, dll)	Cat Meni Besi/Kayu	ķ								

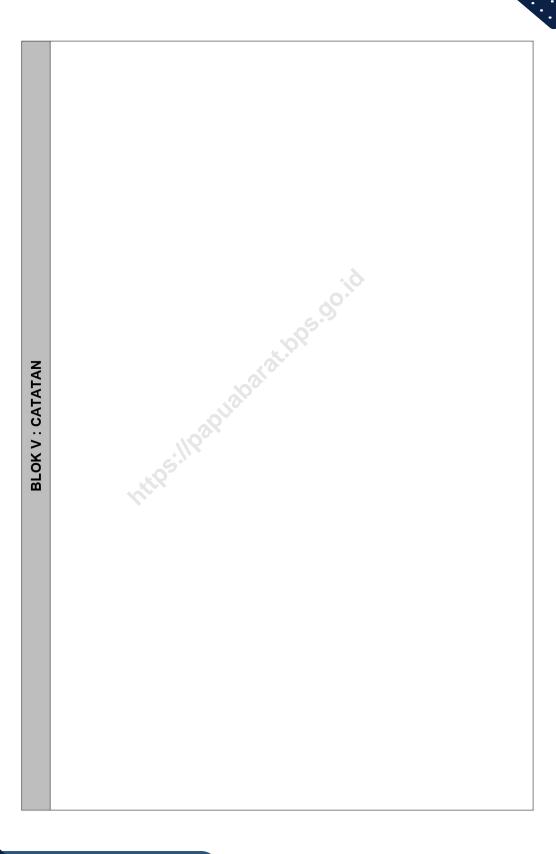
	ARANG TANG		Keterangan	(11)									
H	RA.	Harga per	Satuan Standar/ Setempat Triwulan ini (Rp)	(10)									
SOME ACIMAL A	A LANFA ONGROS A	Harga per satuan	Standar/ Setempat Triwulan sebelumnya (Rp)	(6)									
RIKAN	EKAN (HAKG	at	Berat (kg)	(8)					.0	,0			
AL PAB	DAK ADA, PII	Ukuran Satuan Setempat	Tinggi (m)	(7)				100	9.9				
NATERI/	ECERAN 4.PE	turan Satua	Lebar (m)	(9)		2	OOL						
IARGA I	MEKANGKAP ERINGKAT ME	5	Panjang (m)	(5)	:116								
BLOK IV : DATA HARGA MATERIAL PABRIKAN	GANG GROSIK SUAI DENGAN P		Merek	(4)									
SLOK IV	USEN 3.PEDA ENCACAH SES		Satuan Standar	(3)	m ²	m ²	m ²	m ²	lembar	lembar	lembar	lembar	lembar
	PRIORITAS RESPONDENT TELAGANG GROSR Z.PRODUSEN S.PEDAGANG GROSR MERANGRAF ELERAN FIEDAGANG ELERAN HARGA TANFA UNGROS ANGROTT, UNTUR BARANG TANG BERMEREK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.		Kualitas Barang	(2)	Keramik Uk. 40 x 40 cm (putih polos)	Keramik Uk. 60 x 60 cm (putih polos)	Keramik Uk. 40 x 40 cm (warna/motif)	Keramik Uk. 60 x 60 cm (warna/motif)	Atap Metal (tebal 0,25 mm)	Atap Metal (tebal 0,30 mm)	Kaca Polos Bening 3 mm	Kaca Polos Bening 5 mm	Gypsum Plafon 9 mm
SCHOOL SAFEGUER	PRIORITAS RESPO		Komoditas Barang	(1)		Tegel/Keramik	(asiatile, ikad, dll)		Genteng/Atap SAKURA ROOF	(tidak berpasir) (multiroof, sokaroof, dll)	Kaca	ASAHI (mulia, tossa, dll)	Gypsum JAYABOARD (elephant, knauf, dll)

PRIORITAS RESPC	BLOK IV : DATA HARGA MATERIAL PABRIKAN PRIORITAS RESPONDEN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.	SLOK IV USEN 3.PED/ ENCACAH SE	BLOK IV : DATA HARGA MATERIAL PABRIKAN DUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HAF NENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK	ARGA N MERANGKAP E ERINGKAT ME	IATERIA ECERAN 4.PEI REK. JIKA TII	AL PABF DAGANG ECE DAK ADA, PIL	RIKAN ERAN (HARG IH MEREK LA	A TANPA ONGKOS /	ANGKUT). UNTUK BA RA.	RANG YANG
				ž	Ukuran Satuan Setempat	n Setempa	Ļ	Harga per satuan	Harga per	
Komoditas Barang	Kualitas Barang	Satuan Standar	Merek	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)	Standar/ Setempat Triwulan sebelumnya (Rp)	Satuan Standar/ Setempat Triwulan ini (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)	(11)
	Kabel NYA Ukuran 1 x 1,5 mm²	E	5	. 20						
Kabel	Kabel NYA Ukuran 1 x 2,5 mm²	Е		911910	9					
ETERNA (praba, visicom, dll)	Kabel NYM Ukuran 3 x 2,5 mm²	٤			MOL!O					
	Kabel NYM Ukuran 3 x 4 mm²	٤				5.00				
Mesin Pompa Air	Pompa Shallow Pump (kedalaman s.d. 10 m)	buah								
(Otomatis) SHIMIZU	Pompa Semi Jet Pump (kedalaman 11 - 26 m)	buah								
(sanyo, panasonic, dll)	Pompa Jet Pump (kedalaman > 26 m)	buah								
	Profil Canal "C" Tipe C75.065	batang								
Rangka Atap Baja	Profil Canal "C" Tipe C75.070	batang								
	Profil Canal "C" Tipe C75.075	batang								

PRIORITAS RESPO	BLOK IV : DATA HARGA MATERIAL PABRIKAN PRIORITAS RESPONDEN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.	SLOK IV USEN 3.PEDA ENCACAH SES	BLOK IV : DATA HARGA MATERIAL PABRIKAN DUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HAF IENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK	IARGA IN MERANGKAP E ERINGKAT ME	IATERI/ ECERAN 4.PE REK. JIKA TII	AL PABF DAGANG ECE DAK ADA, PIL	RIKAN FRAN (HARG, IH MEREK LA	A TANPA ONGKOS A	ANGKUT). UNTUK BA RA.	ARANG YANG
				Ğ	Ukuran Satuan Setempat	ın Setempa	,	Harga per satuan	Harga per	
Komoditas Barang	Kualitas Barang	Satuan Standar	Merek	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)	Standar/ Setempat Triwulan sebelumnya (Rp)	Satuari Standar/ Setempat Triwulan ini (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)	(11)
∆ Iminimim	Profil Kusen Aluminium 3 inchi	E	2	5:119						
ALEXINDO	Profil Kusen Aluminium 4 inchi	ш		0.9						
(alco, damai abadi, dll)	Aluminium Lembaran 1 mm, panjang 2 m, lebar 1 m	Е			ON O					
Tangki Air Fiber	Ukuran 500 - 650 liter	buah				00				
PENGUIN	Ukuran 1000 - 1100 liter	buah				5				
(profile, excell, dll)	Ukuran 1200 – 1300 liter	buah					9.0			
	Lampu Pijar 25 W	buah					•			
Lampu	Lampu TL Panjang 18 - 20 W	buah								
PHILLIPS	Lampu SL (TL Pendek) 18 W	buah								
(hannocs, chiyoda, dll)	Lampu SL (TL Pendek) 20 W	buah								
	Lampu LED (bohlam) 3 - 5 W	buah								

BLOK IV : DATA HARGA MATERIAL PABRIKAN

PRIORITAS RESPO	PRIORITAS RESPONDEN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANG BERMEREK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.	USEN 3.PEDA ENCACAH SE	GANG GROSIR I SUAI DENGAN P	MERANGKAP E ERINGKAT ME	CERAN 4.PE REK. JIKA TII	DAGANG ECI JAK ADA, PIL	ERAN (HARG	GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG EK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.	ANGKUT). UNTUK B. RA.	ARANG YANG
				Ü	Ukuran Satuan Setempat	ın Setempa	ıt	Harga per satuan	Harga per	
Komoditas Barang	Kualitas Barang	Satuan Standar	Merek	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)	Standar/ Setempat Triwulan sebelumnya (Rp)	Satudii Standar/ Setempat Triwulan ini (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)	(11)
MCB	1 Phasa 4 Ampere	buah		00						
SCHNEIDER/ MERLIN GERIN	1 Phasa 6 Ampere	buah		9						
(broco, shukaku, dll)	1 Phasa 10 Ampere	buah			5					









VHKK2021.SAU SEWA ALAT BERAT DAN UPAH JASA KONSTRUKSI

SURVEI HARGA KEMAHALAN KONSTRUKSI

PERIODE: APRIL 2021

RAH	ASIA	10	VICTOR (VICTOR) (VICTOR) (VICTOR) (VICTOR) (VICTOR) (VICTOR)	NO 95 WEST STATE OF S			
		BLO	(I : KETERA	NGAN TEMP	PAT		
1	Provinsi					Ì	

2.	Kabupaten/Kota*)	6,	
		,O*	

		BLOK II : KETERA	ANGA	N PETUGAS	
1	. Nama Pencacah		5.	Nama Pengawas	
2	. NIP Pencacah		6.	NIP Pengawas	
3	. Tanggal Pencacah	20110	7.	Tanggal Pengawas	
4	Tanda Tangan Pencacah	1495:1198	8.	Tanda Tangan Pengawas	

	BLO	K III : KETERANGAN RESPONDEN
1.	Nama Responden	
2.	Alamat Responden	
3.	Nomor Telepon/HP	
4.	Kategori Responden	 □ Pedagang Grosir □ Produsen □ Pedagang Eceran □ Dinas PU atau SKPD Lainnya □ Jasa Penyewaan Alat Berat □ Pemborong/Kontraktor
5.	Tanda Tangan Responden	

PENJELASAN

- Tujuan dari survei ini adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan data harga material, dan produk yang tersedia di lapangan yang identik dengan item yang dideskripsikan pada kuesioner dan buku pedoman.
- 2. Responden adalah pedagang grosir/distributor yang menjual bahan bangunan/konstruksi ke kontraktor/pedagang lain. Jika tidak ada pedagang grosir maka diperbolehkan produsen, pedagang campuran (grosir merangkap eceran), atau pedagang eceran.
- 3. Responden harus berada di ibukota kabupaten/kota dan sekitarnya. Diusahakan responden sama untuk setiap periode pencacahan. Jika terjadi pergantian responden maka dicari penggantinya yang sesuai.
- 4. Spesifikasi/kualitas barang dipilih berdasarkan prioritas kualitas/merk barang yang telah ditentukan pada kuesioner. Jika tidak ditemukan, cari kualitas yang setara.
- 5. Spesifikasi/kualitas barang setiap periode harus sama. Jika tidak ditemukan kembali spesifikasi/kualitas barang yang lama maka dicari pengganti yang setara.
- 6. Dokumen yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh petugas pencacah dan pemeriksa, dipindahkan ke komputer menggunakan program data entri online dari BPS RI (https://webentry.bps.go.id/shkk).
- 7. Dokumen yang sudah dientri disimpan di BPS Kabupaten/Kota untuk digunakan pada saat rekonsiliasi di BPS Provinsi.

BLOK IV: DATA HARGA ASPAL

PRIORITAS RESPONDEN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK.

JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.

Komoditas Barang	Kualitas Barang	Satuan Standar	Merek	Harga per satuan Standar Triwulan sebelumnya (Rp)	Harga per satuan Standar Triwulan ini (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Curah Grade 60/70 - Lokal	ton				
Aspal	Drum Grade 60/70 (155 kg) - Lokal	drum				
, topai	Curah Grade 60/70 - Impor	ton				
	Drum Grade 60/70 (155 kg) - Impor	drum				

		OK V : DATA SEWA Anaksimal 8 tahun, tanpa operat			
Komoditas Barang	Kualitas Barang	Satuan/Unit (lingkari kode satuan/unit) (01) 1 BULAN (02) 200 JAM	Nilai Sewa per Satuan/Unit Triwulan sebelumnya (Rp)	Nilai Sewa per Satuan/Unit Triwulan ini (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kapasitas bucket 0,8 m³	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
Excavator PC- 200	Kapasitas bucket 0,6 m³	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	Kapasitas bucket 0,4 m³	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM	.0.		
	Universal Blade (U-Blade)	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM	5.0		
Bulldozer D-65	Straight Blade (S-Blade)	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	Bowl Dozer	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	Kapasitas bucket 0,8 m³	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
Loader (wheel atau track)	Kapasitas bucket 0,6 m³	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
**	Kapasitas bucket 0,4 m³	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
Tandem/ Vibrating	8 – 10 ton	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
Roller	Kurang dari 8 ton	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	Kapasitas 20 ton (tronton)	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
Dump truck	Kapasitas 12 ton (engkel)	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	Kapasitas 8 ton (colt diesel)	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
Motor Grader	≤ 100 HP	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
WOLDI GIAGEI	> 100 HP	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
Asphalt Finisher	-	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	60 KVA	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
Generator Set	40 KVA	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	20 KVA	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			

(tidak ter		VI : JASA KONST lainnya seperti makan, r	RUKSI okok, minum, dan lainny	a)
Komoditas Barang	Satuan/Unit	Upah per Satuan/Unit Triwulan sebelumnya (Rp)	Upah per Satuan/Unit Triwulan ini (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Upah Kepala Tukang	О-Н			
Upah Tukang Batu	О-Н			
Upah Tukang Kayu	О-Н			
Upah Instalatir Listrik	TITIK			
Upah Pembantu Tukang	О-Н		6,	

BLOK VII : CATATAN
BLOK VIII: CATATAN
Will a second se

ST2023
SENSUS PERTANIAN

Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

MENCERDASKAN BANGSA



JI. Trikora Sowi IV No 99 Manokwari- Papua Barat E-mail : papuabarat@bps.go.id Telp (62-986) 2210054 Homepage : https://papuabarat.bps.go.id/

